
ANALISIS BIBLIOMETRIK TREN PENELITIAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (2014-2024)

Muhibudin Wijaya Laksana¹, Iqbal Reza Satria², Mira Renata³

¹Pusat Kajian Governansi Digital, Jurusan Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Political Labs, Jurusan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Program Studi Komunikasi, Universitas Halim Sanusi Bandung

muhibudinwijayalaksana@uinsgd.ac.id¹, iqbalrezasatria@uinsgd.ac.id², mirarrenata15@gmail.com³

***Email Korespondensi:** muhibudinwijayalaksana@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian mengenai media sosial pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2014–2024. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik dengan data diperoleh dari database GARUDA. Analisis dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan VOSviewer untuk mengkaji frekuensi, keterkaitan, dan kepadatan tema berdasarkan 87 artikel terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian media sosial pemerintah daerah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2020, didominasi pendekatan kualitatif dan fokus pada platform Instagram. Terdapat kesenjangan dalam hal diversifikasi pendekatan, platform baru, serta objek wilayah yang dikaji. Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan riset selanjutnya yang lebih kontekstual dan beragam.

Kata Kunci: *bibliometrik, media sosial pemerintah daerah, VOSviewer, tren penelitian*

ABSTRACT

This study aims to map trends and identify research gaps on local government social media in Indonesia in the period 2014–2024. The method used is bibliometric analysis with data obtained from the GARUDA database. The analysis was carried out using Microsoft Excel and VOSviewer to examine the frequency, relevance, and density of themes based on 87 selected articles. The results of the study show that studies on local government social media have increased significantly since 2020, dominated by qualitative approaches and focused on the Instagram platform. There are gaps in terms of diversification of approaches, new platforms, and regional objects studied. These findings provide a basis for developing further research that is more contextual and diverse.

Keywords: *bibliometrics, local government social media, VOSviewer, research trends*

PENDAHULUAN

Keberadaan pemerintah daerah di media sosial telah menarik perhatian para akademisi dari berbagai disiplin dalam mengkaji dinamika ini dan diyakini akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya inovasi digital pada media sosial dan juga inovasi tata kelola pemerintah berbasis digital. Pengetahuan akan perkembangan kajian media sosial pemerintah daerah di Indonesia penting untuk dipahami agar penelitian selanjutnya mengenai kajian ini dapat menciptakan suatu hasil penelitian yang mampu memberikan rekomendasi yang lebih inovatif dan kontekstual untuk pengembangan pengelolaan media sosial pemerintah daerah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemetaan dan pemahaman yang komprehensif terhadap tren serta temuan penelitian terkait pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah di Indonesia menjadi langkah strategis dalam merancang kebijakan dan praktik komunikasi digital yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pemerintah seperti Keterbukaan Informasi Publik dan juga Permenpanrb nomor 83 tahun 2012 mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan mengelola media sosial untuk menciptakan efisiensi layanan dan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Menteri PAN-RB, 2012). Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pembangunan daerah melalui berbagai saluran sebagai bentuk pelayanan publik serta mendorong partisipasi pembangunan daerah (Presiden Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan proses demokrasi di Indonesia.

Media sosial merupakan salah satu platform daring yang memungkinkan antar penggunaannya untuk bisa saling berinteraksi, berbagi konten dalam berbagai jenis bentuk seperti text, audio, visual maupun secara kombinasi (Asari et al., 2023). Dengan berbagai keunggulan dari media sosial, pemerintah dapat melakukan komunikasi publik secara lebih efektif. Gohar F. Khan, (2017) menjelaskan, pemanfaatan media oleh pemerintah yang ia sebut dengan konsep *Social Media Based Government-SMBG* (Pemerintahan Berbasis Media Sosial), merupakan budaya tata kelola *Sharing* (berbagi), *Transparency* (transparan), *Openness* (terbuka), dan *Collaboration* (kolaborasi) sebagai suatu landasan yang harus dibangun dan dipelihara melalui mandat administratif, keuangan, politik, hukum, dan perubahan perilaku di semua tingkatan pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan interaksi antara pemerintah dan publik (Ulayya et al., 2022); membangun citra positif (Hakiki et al., 2024), meningkatkan kepercayaan publik, membantu mengurangi kesenjangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat (Supriyanto et al., 2024); serta mempengaruhi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Rizqi et al., 2023).

Penelitian ini merupakan studi bibliometrik untuk mengkaji perkembangan dan arah tema penelitian mengenai media sosial pemerintah daerah. Bibliometrik merupakan teknik untuk mengkaji tren bidang ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu tertentu melalui komputasi dan analisis terhadap hasil penelitian tertulis yang dipublikasikan (Lawani, 2009). Bibliometrik mengkaji kerangka penelitian berdasarkan beberapa faktor publikasi, yaitu penulis, sitasi, istilah atau kata kunci, negara, dan jurnal. Sumber yang digunakan dapat berupa jurnal, buku, bab buku, prosiding, atau sumber publikasi ilmiah. Terdapat dua aspek dalam analisis bibliometrik, yaitu analisis kinerja yang mengukur produktivitas dan efek jangka waktu dari jumlah publikasi-sitasi, serta pemetaan sains yang memvisualisasikan area struktural dan dinamis (Zhou et al., 2022).

Penelitian ini mengacu pada konsep Social Media Based Government (SMBG) dari Khan (2017), yang menekankan prinsip sharing, transparency, openness, collaboration. Teori ini memberi kerangka bahwa pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah bukan sekadar saluran informasi, tetapi bagian dari budaya tata kelola digital. Selain itu, perspektif e-Government dan Digital Governance (Bekkers & Homburg, 2007; Criado et al., 2013) juga relevan karena memandang media sosial sebagai instrumen partisipasi publik dan inovasi layanan. Teori komunikasi publik digital (Chadwick, 2017) menegaskan adanya pergeseran pola komunikasi pemerintah dari satu arah menuju model interaktif dan partisipatif.

Beberapa studi bibliometrik mengenai media sosial pemerintah pernah dilakukan. **Pertama**, (Wijaya, 2022) menganalisis perkembangan ilmiah tema media sosial dalam layanan komunikasi publik dalam kurun waktu tahun 2012–2021 dari database Scopus. Aplikasi Publish or Perish dan Vosviewer digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini menemukan bahwa penelitian dengan tema media sosial pemerintah menunjukkan dinamika peningkatan dan penurunan. Dari 200 artikel penelitian, ditemukan beberapa topik seperti: e-Government, Facebook, pemerintah daerah, Twitter, Web 2.0, Crowdsourcing, Transparansi, Keterlibatan, Komunikasi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pemerintahan terbuka.

Kedua, (Ahsan & Sterjo, 2023) menganalisis perkembangan penelitian mengenai penggunaan media sosial dalam komunikasi pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2013–2022 dari database Scopus. Aplikasi CiteSpace digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Penelitian ini menemukan bahwa penelitian dengan tema komunikasi pemerintah daerah melalui media sosial mengalami peningkatan dalam kurun waktu sepuluh tahun. Dari 166 artikel penelitian, ditemukan beberapa topik seperti: adopsi sektor publik, konten Facebook, studi kasus, interaktivitas e-Government, *smart participation*, dan fungsionalitas multi-level.

Ketiga, (Kholidin, 2023) menganalisis perkembangan penelitian mengenai inovasi media sosial pemerintah dalam kurun waktu tahun 2012–2023 dari database Scopus. Aplikasi CiteSpace digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Penelitian ini menemukan bahwa penelitian dengan tema inovasi media sosial pemerintah mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya, meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun-tahun tertentu. Dari 194 artikel penelitian, ditemukan beberapa topik seperti: penyampaian pelayanan publik, penggunaan facebook, pembangunan berkelanjutan, kampanye makan sehat, *machine learning*, perubahan sikap, dan persepsi publik.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek. **Pertama**, fokus penelitian ini secara khusus pada media sosial pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2014–2024, yang belum diteliti secara komprehensif dalam analisis bibliometrik berbasis database Garuda. **Kedua**, pendekatan bibliometrik dalam penelitian ini akan memberikan pemetaan ilmiah yang lebih kontekstual terhadap tren penelitian media sosial pemerintah daerah di Indonesia. **Ketiga**, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian media sosial pemerintah daerah di Indonesia yang belum terbahas dalam kajian-kajian sebelumnya, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai media sosial pemerintah daerah. **Keempat**, belum ada integrasi analisis tren dengan teori SMBG dan e-Government untuk memahami peran strategis media sosial dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian media sosial pemerintah daerah dengan memperkaya literatur akademik mengenai penggunaan media sosial dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, serta menawarkan wawasan berbasis data yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan digital pemerintah daerah yang lebih inovatif dan efektif.

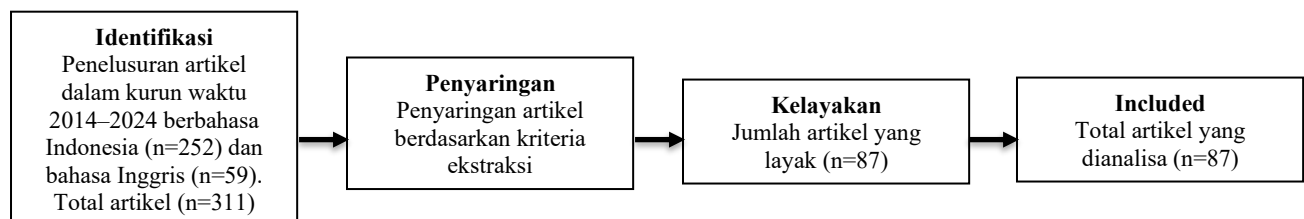
METODE PENELITIAN

Sumber data bibliometrik bersumber dari *database* GARUDA (Garba Rujukan Digital) yang merupakan sumber publikasi dalam skala nasional pada 12 Februari 2025. Data bibliometrik dianalisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel, Mendeley Desktop dan Vosviewer (*Visualization of Similarities*) versi 1.6.20.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. **Pertama**, pengumpulan data dengan pembatasan terbitan tahun 2014-2024 menggunakan kata kunci: “Media Sosial Pemerintah”, “Facebook Pemerintah”, “Youtube Pemerintah”, “Twitter Pemerintah”, “Instagram Pemerintah”, “Tiktok Pemerintah”, dan “Threads Pemerintah” yang menghasilkan 252 artikel. Untuk mendapatkan data artikel yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, pencarian dilakukan menggunakan kata kunci: “Social Media Government”, “Facebook Government”, “Youtube Government”, “Twitter Government”, “Instagram Government”, “Tiktok Government”, dan “Threads Government” yang menghasilkan 59 artikel. Total keseluruhan artikel yang terkumpul berjumlah 311 artikel.

Kedua, penginputan data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi Mendeley berupa file RIS (*Research Information System*) dan file PDF (*Portable Document Format*). Pada tahap ini dilakukan ekstraksi data dengan ketentuan: (a) artikel dengan judul ganda; (b) artikel studi literatur; (c) artikel pengabdian kepada masyarakat; (d) objek penelitian yang bukan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta (e) file RIS dan PDF yang tidak ditemukan. Hasil ekstraksi data didapatkan sebanyak 87 artikel. Aplikasi Mendeley digunakan untuk memperbaiki database sesuai dengan file artikel.

Gambar 1. Diagram Alir Penentuan Database di GARUDA



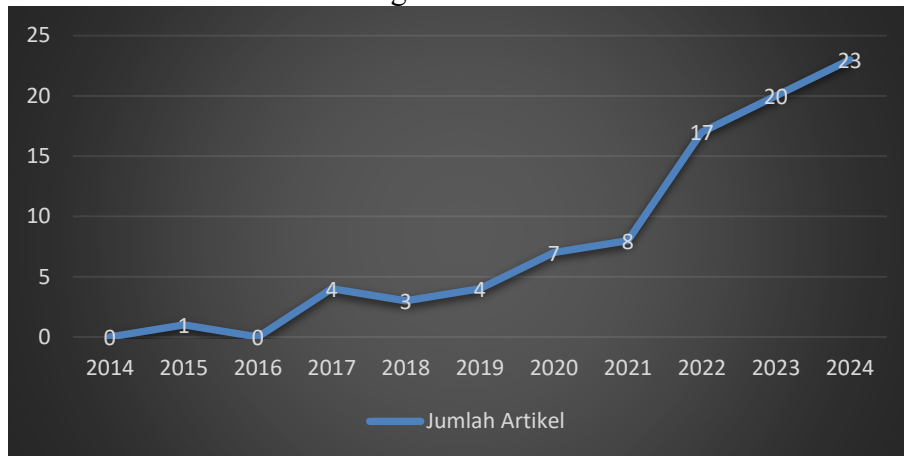
Ketiga, melakukan analisa data dalam bentuk statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mendapatkan tren penelitian berdasarkan: (1) tahun; (2) kategori pemerintah daerah, (3) jenis platform media sosial yang menjadi objek penelitian; serta (4) pendekatan dan metode yang digunakan. Selain itu, aplikasi VOSviewer digunakan untuk melakukan analisa *co-occurrence* terhadap kata kunci sebagai unit analisisnya untuk mendapatkan tema penelitian berdasarkan: (1) jaringan tema; (2) perkembangan tematik; serta (3) kepadatan tema. Analisis *co-occurrence* akan memberikan kontribusi terhadap relevansi tema yang menjadi bahasan utama atau tema yang paling sering dijadikan kajian terhadap sebagian kecil yang masih memiliki peluang penelitian (Bukar et al., 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tren Berdasarkan Tahun

Secara keseluruhan, penelitian mengenai media sosial pemerintah daerah di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2020 dan terus berkembang sampai tahun 2024. Perkembangan penelitian pada periode awal (tahun 2014–2025) menunjukkan pertumbuhan yang lambat dengan hanya ditemukan 1 dokumen pada tahun 2015. Mulai tahun 2017 kajian ini mulai mendapat perhatian para peneliti dan semakin konsisten sampai tahun 2019. Kajian ini semakin berkembang pada tahun 2020 dan terus meningkat sampai tahun 2024.

Gambar 2. Perkembangan Publikasi Berdasarkan Tahun



Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025)

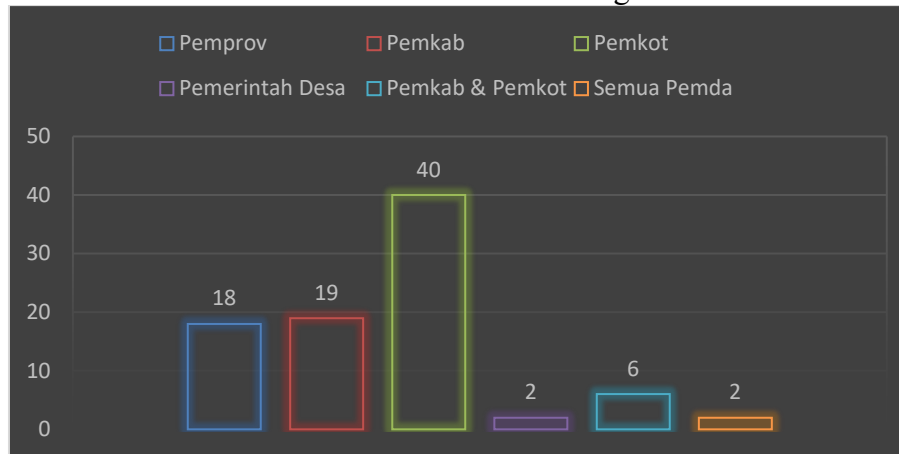
Peningkatan kajian media sosial pemerintah daerah di Indonesia dipengaruhi oleh meningkatnya digitalisasi dalam pemerintahan pasca pandemi Covid-19 dimana media sosial dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi layanan pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya sebagai respons jangka pendek terhadap keterbatasan interaksi fisik selama pandemi Covid-19, tetapi juga menunjukkan pergeseran strategis menuju pola komunikasi digital yang lebih terbuka, partisipatif, dan *real-time* dalam upaya membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian (F. Rahmanto et al., 2024) bahwa pemanfaatan media sosial dalam situasi pandemi Covid-19 merupakan upaya tata kelola adaptif pemerintah dalam merespon perubahan yang terjadi. Beberapa penelitian mengungkap media sosial digunakan sebagai strategi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai Covid-19 (Elisabet Isyana Rahayu et al., 2023; Fayiz & Saeni, 2022; Pratama et al., 2025; Pratiwi & Dunan, 2021; Rahayu et al., 2023; Saputra Akasse, 2022), dengan memanfaatkan fitur media sosial agar lebih persuasif (Agustiani & Ahdan, 2020). Menurut penelitian (Nugraha & Nusa, 2022) bahwa penyampaian informasi protokol kesehatan Covid-19 melalui media sosial Instagram dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, masyarakat memiliki ketergantungan terhadap media untuk memuaskan kebutuhan informasi dan menimbulkan keterlibatan yang lebih jauh sehingga merubah perilaku.

Tren Berdasarkan Pemerintah Daerah

Penelitian mengenai media sosial pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2014–2024 didominasi oleh kajian terhadap pemerintah kota secara tunggal dengan 40 penelitian. Selanjutnya, kategori pemerintah kabupaten secara tunggal dan pemerintah provinsi secara tunggal memiliki jumlah yang cukup besar masing-masing dikaji sebanyak 19 penelitian dan 18 penelitian. Sementara itu, kategori pemerintah kabupaten dan kabupaten kota secara bersamaan serta seluruh kategori pemerintah daerah secara bersamaan masih sedikit dikaji dengan jumlah masing-masing 6 penelitian dan 2 penelitian. Selain itu, kajian mengenai media sosial pada pemerintah desa masing sangat terbatas dengan jumlah 2 penelitian.

Gambar 4. Jumlah Penelitian Berdasarkan Kategori Pemerintah Daerah



Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025)

Penelitian mengenai media sosial pemerintah desa berpotensi untuk dilakukan kajian pengembangan, tidak hanya pada aspek pemanfaatan media sebagai penyampaian informasi pemerintah desa seperti yang dilakukan oleh (Tania et al., 2023) dan juga untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa seperti yang dilakukan oleh (Kalesaran et al., 2024a), namun juga pada konteks lainnya seperti salah satunya ialah upaya pemerintah desa dalam mensosialisasikan Desa Wisata sebagai salah satu program unggulan desa-desa di Indonesia.

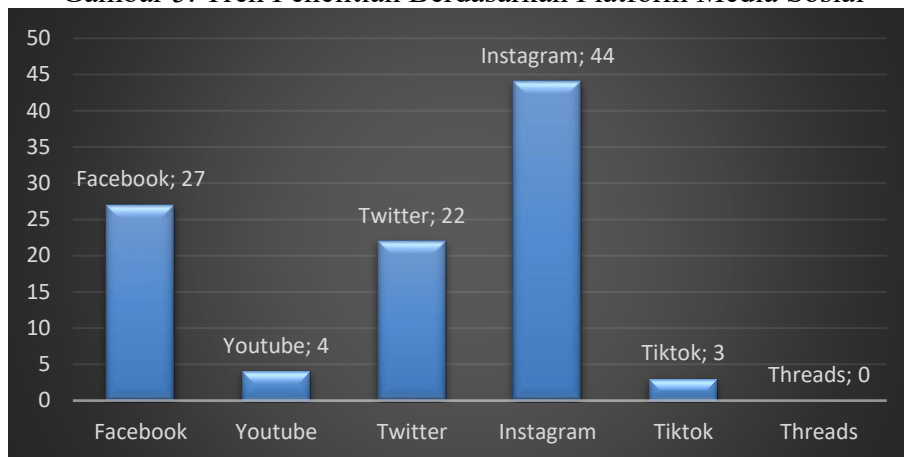
Selain itu, kajian terhadap objek dengan skala yang lebih besar masih berpotensi dilakukan pengembangan. Berdasarkan hasil temuan, selama ini kajian ini dilakukan untuk membandingkan keterbukaan informasi melalui media sosial pada pemerintah provinsi se-Indonesia (Najwa et al., 2021) dan perbandingan pemanfaatan media sosial dalam rangka akuntabilitas publik pada pemerintah provinsi se-Indonesia (Priyambodo et al., 2024). Pada skala pemerintah kota dan kabupaten pernah dilakukan perbandingan respon pelayanan publik melalui media sosial pada pemerintah kota di Indonesia (Soantahon, 2023) dan perbandingan strategi pemanfaatan platform Facebook untuk meningkatkan pelayanan publik pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Indonesia (Puspitaningrum et al., 2019), serta perbandingan respon publik terhadap media sosial pemerintah daerah di Indonesia (Furqon et al., 2018).

Skala yang lebih kecil berdasarkan pemerintah di daerah tertentu, pernah dilakukan penelitian mengenai perbandingan jenis interaksi masyarakat dan pemerintah pada pemerintah daerah di Provinsi Riau (Najwa et al., 2020), perbandingan keterlibatan warga pada platform Facebook pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (Purwadi et al., 2022), perbandingan persepsi publik mengenai *good governance* pada pemerintah daerah di wilayah Solo Raya (A. N. Rahmanto, 2022), serta perbandingan pemanfaatan media sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada pemerintah desa di Kabupaten Minahasa (Kalesaran et al., 2024b).

Tren Berdasarkan Platform Media Sosial

Instagram menjadi platform yang paling banyak dikaji dalam penelitian mengenai media sosial pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dengan jumlah 44 kali dijadikan objek penelitian. Platform Facebook dan Twitter masing-masing dijadikan objek penelitian sebanyak 27 kali dan 22 kali. Youtube dan Tiktok menjadi platform media sosial tidak terlalu banyak dikaji, dimana masing-masing hanya dijadikan objek penelitian sebanyak 4 kali dan 3 kali. Sementara Threads sebagai platform media sosial terbaru, belum pernah dijadikan objek penelitian sama sekali.

Gambar 5. Tren Penelitian Berdasarkan Platform Media Sosial

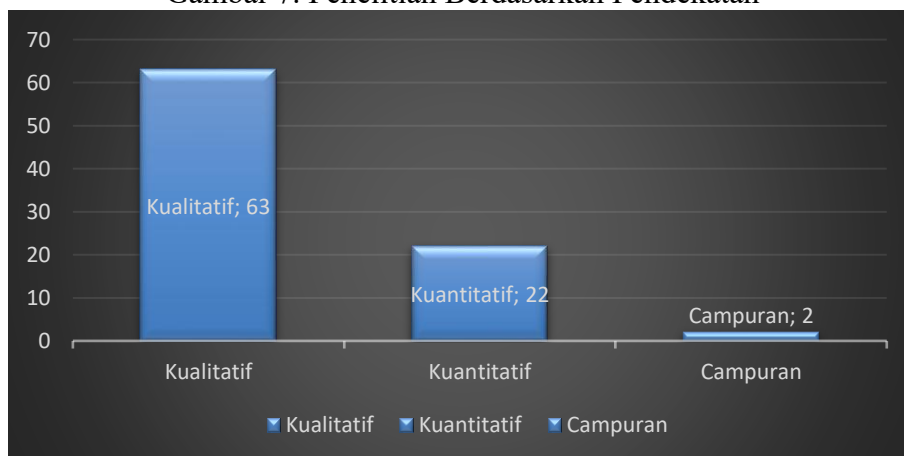


Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025)

Tren Berdasarkan Pendekatan dan Metode Penelitian

Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah 63 artikel, menggunakan pendekatan kuantitatif sebanyak 22 artikel. Sementara hanya 2 artikel yang menggunakan pendekatan campuran. Dominasi pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang media sosial pemerintah di Indonesia masih berfokus pada pemahaman konseptual dan eksploratif daripada pendekatan berbasis data numerik dan statistik. Kurangnya penelitian kuantitatif menandakan adanya peluang besar bagi peneliti untuk mengembangkan studi berbasis data, misalnya melalui analisis sentimen, *machine learning*, dan analisis *big data* untuk memahami tren komunikasi pemerintah di media sosial. Pendekatan campuran yang masih jarang digunakan menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih integratif dalam penelitian media sosial pemerintah masih belum banyak dieksplorasi, padahal pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam analisis kebijakan dan efektivitas komunikasi digital pemerintah.

Gambar 7. Penelitian Berdasarkan Pendekatan

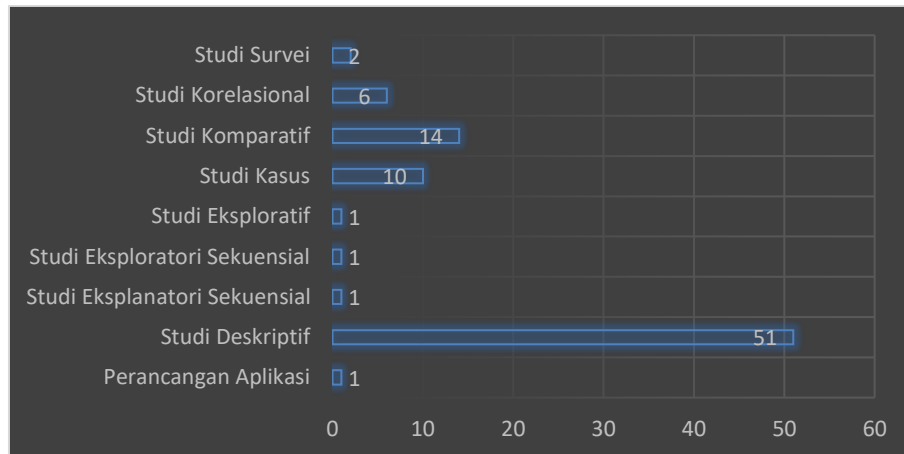


Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, Studi Deskriptif merupakan metode yang paling dominan digunakan, jauh lebih banyak dibandingkan metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian media sosial pemerintah daerah lebih banyak berfokus pada pemetaan fenomena, tren, atau karakteristik media sosial tanpa mencoba mencari hubungan kausal atau membandingkan variabel. Studi Komparatif dan Studi Kasus merupakan metode berikutnya yang cukup sering digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan dalam

membandingkan kebijakan atau praktik media sosial antar daerah atau mendalami kasus tertentu secara spesifik.

Gambar 8. Penelitian Berdasarkan Metode



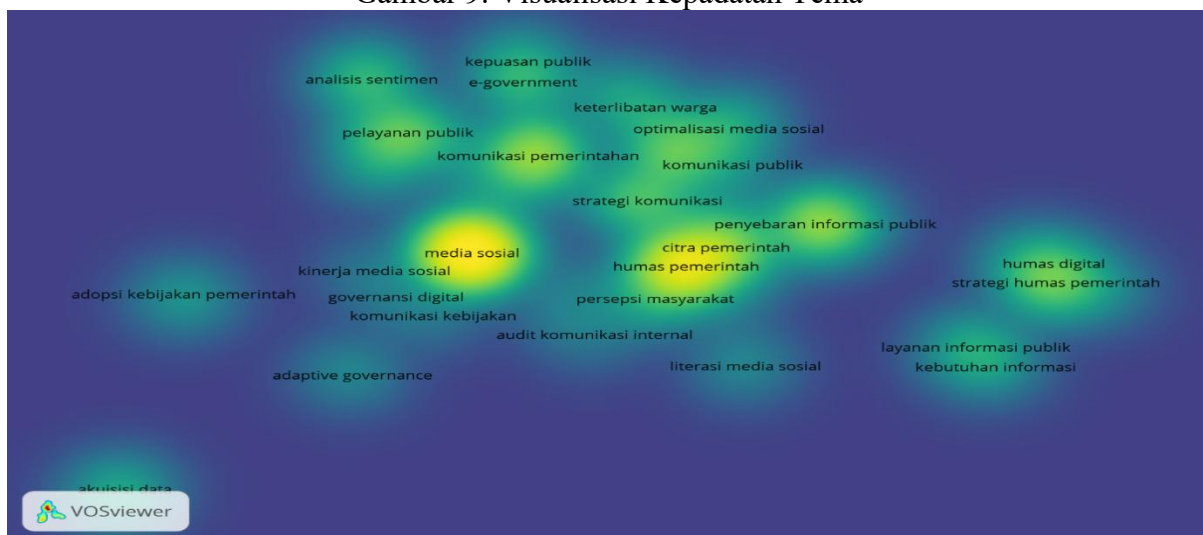
Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025)

Studi Korelasional dan Studi Survei memiliki jumlah yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam penelitian yang mencoba mengukur hubungan antar variabel. Ini bisa menunjukkan kurangnya data yang dapat digunakan untuk analisis korelasional atau kausal dalam konteks media sosial pemerintah daerah. Selain itu, minimnya Studi Eksploratif dan Eksplanatori menunjukkan bahwa masih jarang dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali temuan baru atau menjelaskan hubungan sebab-akibat secara lebih mendalam. Metode Perancangan Aplikasi hanya digunakan sekali oleh (Effendi & Noviana, 2021), hal ini menunjukkan bahwa studi terkait pengembangan teknologi atau inovasi digital untuk mendukung media sosial pemerintah daerah masih sangat terbatas.

Tren Berdasarkan Tema Kata Kunci

Analisis kepadatan (*density*) tema melalui Vosviewer digunakan pada penelitian ini untuk memperlihatkan intensitas atau popularitas tema yang ditunjukkan melalui visualisasi kepadatan tema. Menurut van Eck & Waltman (2023), setiap titik tema memiliki warna yang menunjukkan kepadatan tema pada titik tersebut dimana semakin besar tema maka semakin dekat dengan warna kuning sebaliknya, semakin kecil tema maka semakin dekat dengan warna biru.

Gambar 9. Visualisasi Kepadatan Tema



Sumber: Olah Data Vosviewer (2025)

Visualisasi kepadatan tema di atas dihasilkan berdasarkan perhitungan bobot tema untuk menunjukkan frekuensi kemunculan suatu tema (van Eck & Waltman, 2023). Tema yang lebih dekat dengan warna kuning memiliki bobot tema yang tinggi, sementara tema yang lebih dekat dengan warna biru memiliki bobot tema yang rendah. Berdasarkan hasil analisa Vosviewer pada tabel 1 menunjukkan urutan frekuensi kemunculan tema berdasarkan bobot tema.

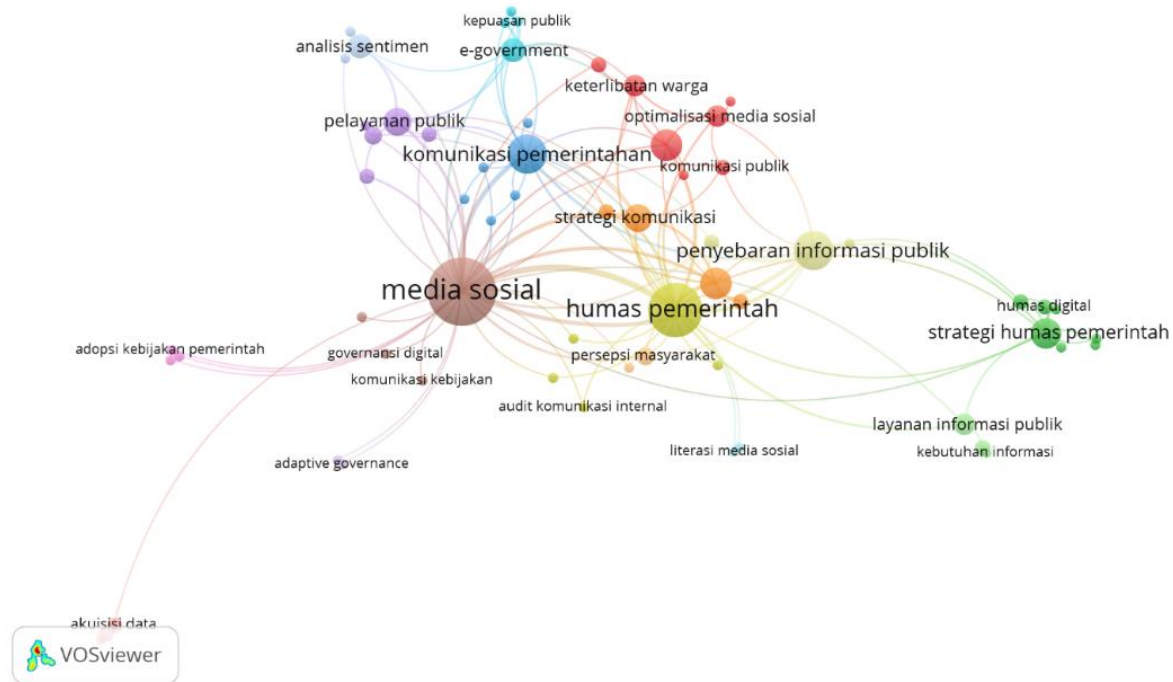
Tabel 1. Urutan Frekuensi Kemunculan Tema

Tema	Bobot Tema (Frekuensi)	Tema	Bobot Tema (Frekuensi)
media sosial	40	kepuasan publik	1
humas pemerintah	26	pemasaran media sosial	1
komunikasi pemerintahan	14	sikap publik	1
penyebaran informasi publik	14	adopsi kebijakan pemerintah	1
citra pemerintah	9	kebijakan publik	1
manajemen media sosial	9	proses kebijakan publik	1
strategi humas pemerintah	8	adaptive governance	1
strategi komunikasi	7	akuntabilitas publik	1
pelayanan publik	7	komunikasi bencana	1
e-government	5	partisipasi masyarakat	1
analisis sentimen	5	social media influencer (smi)	1
keterlibatan warga	4	sosialisasi kegiatan	1
optimalisasi media sosial	4	audit komunikasi internal	1
layanan informasi publik	4	citra daerah	1
persepsi masyarakat	3	computer mediated communication	1
strategi media sosial	3	komunikasi risiko	1
informasi program	2	good governance	1
komunikasi publik	2	media informasi publik	1
humas digital	2	perancangan aplikasi	1
pengukuran engagement	2	interaksi pemerintah-publik	1
keterbukaan informasi publik	2	komunikasi organisasi	1
responsivitas pelayanan publik	2	kategorisasi informasi	1
pemanfaatan media sosial	2	literasi media sosial	1
promosi pariwisata	2	pengelola humas pemerintah	1
kualitas informasi	2	kinerja media sosial	1
efektivitas media sosial	2	opini publik	1
akuisisi data	2	branding wisata	1
jenis interaksi	2	efektivitas kampanye	1
		governansi digital	1
		kebutuhan informasi	1
		komunikasi kebijakan	1
		efektivitas komunikasi	1
		ekologi media	1
		popularitas media sosial pemerintah	1
		reaktualisasi peran humas	1

Sumber: Analisa Data Vosviewer (2025)

Selain mengidentifikasi frekuensi tema, peneliti juga melakukan analisa jaringan (*network*) tema untuk memetakan keterkaitan antar tema agar dapat mengidentifikasi struktur tematik dari penelitian media sosial pemerintah daerah selama kurun waktu tahun 2014–2024. Dalam analisis jaringan tema Vosviewer, bobot jaringan menunjukkan jumlah tema yang memuat dua istilah bersamaan yang membentuk suatu jaringan yang ditunjukkan oleh besar label dan luas lingkaran (van Eck & Waltman, 2023).

Gambar 10. Visualisasi Jaringan Antar Tema



Sumber: Olah Data Vosviewer (2025)

Berdasarkan visualisasi jaringan di atas, terdapat 7 tema sentral dan memiliki keterkaitan paling banyak dengan tema-tema lainnya, yakni: Media Sosial (bobot 37); Humas Pemerintah (bobot 23); Komunikasi Pemerintahan (bobot 18); Penyebaran Informasi Publik (bobot 11); Strategi Humas Pemerintah (bobot 11); e-Government (bobot 10); dan Pelayanan Publik (bobot 9). Jarak antar tema dalam visualisasi jaringan menunjukkan keterkaitan antar tema, semakin dekat jarak diantara dua tema maka semakin kuat keterkaitannya (van Eck & Waltman, 2023). Dalam penelitian ini kekuatan keterkaitan antar tema ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Kekuatan Keterkaitan Antar Tema

No.	Tema Sentral	Jarak Kedekatan Keterkaitan dengan Tema Lain
1	Media Sosial	Kinerja Media Sosial; Governansi Digital; Komunikasi Kebijakan; Citra Daerah; Sosialisasi Kegiatan; Good Governance; Persepsi Masyarakat; Humas Pemerintah; Strategi Komunikasi; Akuntabilitas Publik; Interaksi Pemerintah-Publik; Komunikasi Risiko; Komunikasi Organisasi; Komunikasi Pemerintahan
2	Humas Pemerintah	Citra Pemerintah; Kualitas Informasi; Persepsi Masyarakat; dan Branding Wisata
3	Komunikasi Pemerintahan	Efektivitas Komunikasi; Komunikasi Organisasi; dan Komunikasi Risiko
4	Penyebaran Informasi Publik	Reaktualisasi Peran Humas; Kualitas Informasi; dan Citra Pemerintah
5	Strategi Humas Pemerintah	Ekologi Media; Humas Digital; Social Media Influencer; Partisipasi Masyarakat
6	e-Government	Kepuasan Publik; Sikap Publik; Pengukuran Engagement
7	Pelayanan Publik	Keterbukaan Informasi Publik; Kategori Informasi; Strategi Media Sosial; Responsivitas Pelayanan Publik

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Kluster dalam Vosviewer merupakan jaringan yang menunjukkan tema yang saling bertautan dengan tema lain dan sering muncul secara bersamaan (van Eck & Waltman, 2023). Dalam penelitian ini, Vosviewer merekomendasikan 16 kluster tema dengan ambang batas minimal 2 tema yang berkaitan.

Tabel 3. Kluster Tema

Kluster-Warna	Jumlah Tema	Tema
1-Merah	7	efektivitas kampanye; keterlibatan warga; komunikasi publik; manajemen media sosial; media informasi publik; optimalisasi media sosial; pengukuran engagement

Muhibudin Wijaya Laksana, Iqbal Reza Satria, Mira Renata
 ANALISIS BIBLIOMETRIK TREN PENELITIAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH
 DAERAH DI INDONESIA (2014-2024)

2-Hijau	7	computer mediated communication; ekologi media; humas digital; partisipasi masyarakat; pemanfaatan media sosial; social media influencer (smi); strategi humas pemerintah
3-Biru	6	akuntabilitas publik; efektivitas komunikasi; interaksi pemerintah-publik; komunikasi organisasi; komunikasi pemerintahan; komunikasi risiko
4-Kuning	5	audit komunikasi internal; branding wisata; citra daerah; humas pemerintah; sosialisasi kegiatan
5-Ungu	5	kategorisasi informasi; keterbukaan informasi publik; pelayanan publik; responsivitas pelayanan publik; strategi media sosial
6-Cyan	4	e-government; kepuasan publik; pemasaran media sosial; sikap publik
7-Orange	4	citra pemerintah; kualitas informasi; promosi pariwisata; strategi komunikasi
8-Coklat	4	governansi digital; kinerja media sosial; komunikasi kebijakan; media sosial
9-Magenta	3	adopsi kebijakan pemerintah; kebijakan publik; proses kebijakan publik
10-Pink	3	akuisisi data; jenis interaksi; popularitas media sosial pemerintah
11-Hijau Muda	3	efektivitas media sosial; kebutuhan informasi; layanan informasi publik
12-Biru Muda	3	analisis sentimen; opini publik; perancangan aplikasi
13-Kuning Muda	3	informasi program; penyebaran informasi publik; reaktualisasi peran humas
14-Ungu Muda	2	adaptive governance; komunikasi bencana
15-Cyan Muda	2	literasi media sosial; pengelola humas pemerintah
16-Orange Muda	2	good governance; persepsi masyarakat

Sumber: Analisa Data Vosviewer (2025)

Hasil penelitian menunjukkan dominasi platform Instagram dan penggunaan pendekatan kualitatif dalam kajian media sosial pemerintah daerah. Jika dilihat dari perspektif teori SMBG (Khan, 2017), kondisi ini merepresentasikan bahwa pemanfaatan media sosial pemerintah daerah di Indonesia masih berada pada tahap *sharing* dan *transparency*, sementara aspek *collaboration* dan *co-creation* masih minim dieksplorasi.

Dalam kerangka Digital Governance (Criado et al., 2013), minimnya penelitian pada platform baru seperti TikTok dan Threads serta terbatasnya pendekatan kuantitatif menandakan bahwa media sosial pemerintah daerah lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi informasi dasar, bukan sebagai instrumen data-driven governance.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah: **pertama**, pengembangan teori SMBG dalam konteks Indonesia, khususnya untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat bergerak dari sekadar transparansi menuju kolaborasi digital. **Kedua**, penguatan teori e-Government, dengan menegaskan bahwa praktik komunikasi digital pemerintah daerah masih cenderung informasional dibandingkan deliberatif. **Ketiga**, kontribusi bagi teori komunikasi publik digital, di mana hasil ini menunjukkan adanya keterbatasan praktik interaktivitas pemerintah daerah, sehingga membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai transformasi ke arah komunikasi yang partisipatif dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Penelitian media sosial pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama sejak tahun 2020 yang dipicu oleh digitalisasi layanan pemerintahan pasca pandemi Covid-19. Platform yang paling dominan dikaji adalah Instagram, disusul oleh Facebook dan Twitter. Objek penelitian paling banyak difokuskan pada pemerintah kota, sementara pemerintah desa masih sangat jarang dikaji. Pendekatan yang paling banyak digunakan adalah kualitatif dengan dominasi metode deskriptif, sementara pendekatan kuantitatif dan mixed-methods masih minim. Tema utama dalam kajian ini meliputi media sosial, humas pemerintah, komunikasi pemerintahan, pelayanan publik, serta penyebaran informasi publik, yang semuanya tergambar dalam analisis jaringan dan kepadatan tema menggunakan Vosviewer.

Penelitian ini berhasil mengungkap sejumlah kesenjangan penelitian (research gaps) yang perlu ditindaklanjuti, seperti: (1) keterbatasan objek wilayah pada studi tentang

pemerintah desa; (2) minimnya diversifikasi platform baru seperti TikTok dan Threads belum dijadikan objek penelitian secara signifikan; (3) masih minim pendekatan kuantitatif dan mixed methods, termasuk penggunaan analisis big data, *machine learning*, atau analisis sentimen; (3) kurangnya fokus pada pengembangan teknologi yang mengarah pada perancangan aplikasi atau inovasi digital; (4) kurangnya eksplorasi tema kebijakan dan partisipasi digital, beberapa tema penting seperti *adaptive governance*, *good governance*, dan komunikasi kebijakan masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan sehingga penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan: (1) menggunakan database yang lebih luas seperti Scopus, WoS, Sinta, dan lain sebagainya untuk memperkaya dan memperkuat cakupan literatur; (2) menggunakan analisis isi kualitatif untuk menambah kedalaman pemahaman tematik dari literatur yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, A. T., & Ahdan, A. (2020). Analisis Isi Informasi Covid-19 Pada Instagram Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/respon.v1i1.17>
- Ahsan, M. M., & Sterjo, A. (2023). A Scientometric Analysis of Social Media Use in Local Government Communication. *E3S Web of Conferences*, 440, 3025. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003025>
- Asari, A., Syaifuddin, E. R., Ningsi, N., Maria, H. D., Adhicandra, I., Nuraini, R., Bajjuri, A., Pamungkas, A., Kusumah, F. G., & Yuhanda, G. P. (2023). *Komunikasi Digital*. Penerbit Lakeisha.
- Bekkers, V., & Homburg, V. (2007). The Myths of E-Government: Looking Beyond the Assumptions of a New and Better Government. *The Information Society*, 23(5), 373–382. <https://doi.org/10.1080/01972240701572913>
- Bukar, U. A., Sayeed, M. S., Razak, S. F. A., Yogarayan, S., Amodu, O. A., & Mahmood, R. A. R. (2023). A Method for Analyzing Text Using VOSviewer. *MethodsX*, 11(102339), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102339>
- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government Innovation Through Social Media. In *Government information quarterly* (Vol. 30, Issue 4, pp. 319–326). Elsevier.
- Effendi, E., & Noviana, R. (2021). Perancangan Web Sistem Analisis Sentimen Media Sosial Twitter Dengan Metode Valence Aware Dictionary And Sentimen Reasoner (Vader) Menggunakan PHP & MySQL pada Pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32409/jikstik.20.1.369>
- Elisabet Isyana Rahayu, Puji Lestari, & Edwi Arief Sosiawan. (2023). Risk Communication Model Of Covid-19 Disaster Through Instagram And Twitter In Pemerintah Kabupaten Klaten. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 433–454. <https://doi.org/10.24912/jk.v15i2.25167>
- Fayiz, Z., & Saeni, R. (2022). Strategi Humas Pemerintah Kota Parepare dalam Mengelola Media Sosial Sebagai Media Informasi Covid-19. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 31–41. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/28273>
- Furqon, M., 'Ariful, Hermansyah, D., Sari, R., Sukma, A., Akbar, Y., & Rakhmawati, N. A. (2018). Analisis Sosial Media Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Respons Warganet. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(2), 177–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.2.1>
- Hakiki, D., Harahap, H. S., & Sulistyanto, A. (2024). Analisis Bibilometrik Perkembangan Strategi Komunikasi di Media Sosial Pada Instansi Pemerintahan Dalam Keamanan Siber.

- Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 135–148.
- Kalesaran, E. R., Rondonuwu, S. A., & Rembang, M. M. (2024a). Social Media as a Village Government Communication Channel in Improving Public Services to the Community in Minahasa Regency. *Journal of Management and Administration Provision*, 4(3), 286–292.
- Kalesaran, E. R., Rondonuwu, S. A., & Rembang, M. M. (2024b). Social Media as a Village Government Communication Channel in Improving Public Services to the Community in Minahasa Regency. *Journal of Management and Administration Provision*, 4(3), 286–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.55885/jmap.v4i3.408>
- Khan, G. F. (2017). Social Media for Government: A Practical Guide to Understanding, Implementing, and Managing Social Media Tools in The Public Sphere. In *Springer*. Springer.
- Kholidin, M. I. (2023). Bibliometric Analysis: Analysis of Government Social Media Innovations from 2012 to 2023. *E3S Web of Conferences*, 440, 3012. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003012>
- Lawani, S. M. (2009). Bibliometrics: Its Theoretical Foundations, Methods and Applications. *Libri*, 31(Jahresband), 294–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/libr.1981.31.1.294>
- Menteri PAN-RB. (2012). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Permenpanrb Nomor 83 Tahun 2012)* (pp. 1–30).
- Najwa, N. F., Furqon, M. A., Sintiya, E. S., & Puspitaningrum, A. C. (2021). Akuisisi Data Media Sosial Pemerintah untuk Menganalisis Keterbukaan Informasi Penyebaran Covid-19. *Jurnal Sosioteknologi*, 20(1), 46–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2021.20.1.5>
- Najwa, N. F., Yuliska, Y., & Syaliman, K. U. (2020). Analisa Jenis Interaksi Masyarakat dengan Akuisisi Data Sosial Media Pemerintah Kab/Kota Provinsi Riau: Analisa Jenis Interaksi Masyarakat dengan Akuisisi Data Sosial Media Pemerintah. *Jurnal Komputer Terapan*, 6(1), 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.35143/jkt.v6i1.3468>
- Nugraha, R. E., & Nusa, L. (2022). Disfungsi Media Sosial dalam Seruan Pemerintah: Lemahnya Pengaruh Konten Instagram terhadap Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. *Humanitaria*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/hum.v1i1.2517>
- Pratama, R., Senobaan, R. T., Ramdanis, S. N., Cornelia, G., & Irawan, B. (2025). Penyebaran Informasi Vaksinasi Melalui Twitter oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma*, 13(2), 132–146. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/jp.v13i2.13592>
- Pratiwi, D. A., & Dunan, A. (2021). Communication Strategy Of Government Public Relations Depok City In Managing Covid-19 Information During Pandemic On Instagram. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(4), 891–898. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i4.90>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014)* (pp. 1–203).
- Priyambodo, V. K., Lestari, B. A. H., Sukma, P., Awaliah, A., & Hairuzzami, B. A. (2024). Pemetaan Struktur Media Sosial Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Akuntabilitas Publik. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(4), 1344–1355. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.1976>
- Purwadi, A., Kismartini, K., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Keterlibatan Warga Terhadap Akun Twitter Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat: Analisa Data Mining. *PERSPEKTIF*, 11(1), 42–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5283>
- Puspitaningrum, A. C., Sintiya, E. S., Mukhlis, I. R., Nurrosyidah, A., & Rakhmawati, N. A.



- (2019). Strategy to Use Local Government's Facebook Page to Improve Public Services. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, 15(2), 42.
- Rahayu, E. I., Lestari, P., & Sosiawan, E. A. (2023). Model Komunikasi Risiko Bencana Covid-19 Melalui Instagram Dan Twitter Di Pemerintah Kabupaten Klaten. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 433–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jk.v15i2.25167>
- Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 88–100.
- Rahmanto, F., Zaenuri, M., & Fauzi Rahmat, A. (2024). Adaptive Governance Komunikasi Informasi Bencana Covid-19 Melalui Facebook dan Twitter oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.22146/jmki.84049>
- Rizqi, M. D., Saputra, W. A., & Murahman, M. (2023). Menggali Hubungan antara Media Sosial dan Kebijakan Pemerintah: Pendekatan Bibliometrik dan Tinjauan Pustaka. *Jurnal Kawistara: The Journal of Social Sciences and Humanities*, 13(3), 389–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.78591>
- Saputra Akasse, C. (2022). Penggunaan Media Sosial Dalam Penyampaian Informasi Covid-19 Oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(5), 648–655. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i5.431>
- Soantahon, S. M. (2023). Analysis of the Level of Responsiveness of Local Government Public Services through Social Media. *Integration: Journal Of Social Sciences and Culture*, 1(1), 37–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.38142/ijssc.v1i1.53>
- Supriyanto, D., Nuryanti, N., & Noegroho, A. (2024). Media Sosial dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7796–7810. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14048>
- Tania, C. D., Saragih, M. Y., & Deni, I. F. (2023). Optimalisasi Penggunaan Media Sosial dalam Meningkatkan Efektivitas Kampanye Vaksinasi Covid-19 oleh Pemerintah Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak. *Communication & Social Media*, 3(2), 58–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.57251/csm.v3i2.1232>
- Ulayya, K. N., Priharsari, D., & Perdanakusuma, A. R. (2022). Pemanfaatan Media Sosial untuk Pemerintahan: Bagaimana Dinas-Dinas Pemerintah Kota menggunakan Media Sosial untuk Berkomunikasi dengan Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(5), 2064–2071. <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/10973>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2023). VOSviewer Manual. In *Univeristeit Leiden* (pp. 1–53). Univeristeit Leiden.
- Wijaya, T. (2022). A Bibliometric Study of Social Media as a e-Government Public Services. *SAR Journal-Science and Research*, 5(2), 74–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.18421/SAR52-02>
- Zhou, J., Shen, Y., Pantelous, A. A., & Liu, Y. (2022). Quality Function Deployment: A Bibliometric-Based Overview. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 1180–1201. <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3146534>